



Analisis Determinan Disparitas Pendapatan di Kawasan Purwomanggung Tahun 2009-2015

Afina Azka Fauzia¹✉, Deky Aji Suseno²

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juni 2017

Disetujui Agustus 2017

Dipublikasikan

Nopember 2017

Keywords:

Revenue Disparity,

Economic Growth, Number

of Working Population,

HDI, Investment, Inflation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat pendapatan yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Daerah Purwomanggung, apakah dari faktor pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk kerja, IPM, investasi, inflasi, dan belanja pemerintah paling berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Wilayah Purwomanggung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah yang berasal dari dokumen, peraturan dan catatan harian. Metode analisisnya adalah deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor ini menggunakan pendekatan regresi data panel dengan Eviews.

Abstract

This Study aims to determinant affecting income inequality in Purwomanggung Regions, whether economic growth factors, the number of working population, HDI, investment, inflation, and government spending most influential on income disparities in Purwomanggung Region. The data used in this study is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and Central Java Investment Agency which comes from documents, regulations and diaries. Analysis method that is description and quantitative. The analytical tool used to analyze the effect of these factors using panel data regression with Eviews..

© 2017 Universitas Negeri Semarang

✉Alamat korespondensi:

Gedung L2 Lantai 2 FE Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: edaj@mail.unnes.ac.id

ISSN 2252-6965

PENDAHULUAN

Adanya otonomi daerah memaksa pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dituntut untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan cara mengoptimalkan sumberdaya yang ada sehingga pendapatan daerah meningkat. Untuk dapat memeratakan pembangunan disetiap daerah pemerintah Daerah Provinsi Jateng mengambil kebijakan yang diatur dalam Perda Provinsi Jateng Nomor 21 tahun 2003 dengan pembaharuan Perda Provinsi Jateng Nomor 6 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Jateng tahun 2009-2029.

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah meliputi; sistem perdesaan, sistem perkotaan, sistem perwilayah dan sistem jaringan prasarana antar wilayah. Sistem perwilayah sebagai mana yang dimaksud meliputi :Kawasan Kedungsepur (Kab. Kendal, Kab Demak, Kab. Semarang, Kota Semarang, Kab Grobogan dan Kota Salatiga)

1. Kawasan Wanarakuti (Juwana, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Pati)
2. Kawasan Subosukawonosraten (Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, dan Kab. Kelaten)
3. Kawasan Bergasmalang (kab. Brebes, Kota Tegal, Kab. Tegal, dan Kab. Pemalang)

4. Kawasan Petanglong (Kab. Pekalongan, Kab. Batang, dan Kota Pekalongan)
5. Kawasan Barlingmascakep (Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, dan Kebumen)
6. Kawasan Purwomanggung (Kab. Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung)
7. Kawasan Banglor (Kab. Rembang, dan Kab. Cepu)

Tabel 1 menggambarkan PDRB perkawasan strategis di Jawa Tengah tahun 2009-2015. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa PDRB tertinggi terdapat pada Kawasan Kedungsepur dengan rata-rata PDRB sebesar 44.053 m, kemudian Subosukawonosraten dengan rata-rata PDRB sebesar 32.695 milyar, Barlingmascakep dengan rata-rata PDRB sebesar 29.214 milyar, Wanarakuti dengan rata-rata PDRB sebesar 24.120 milyar, Bergasmalang dengan rata-rata PDRB sebesar 16.021 milyar, Purwomanggung dengan rata-rata PDRB sebesar 16.731 milyar, Petanglong dengan rata-rata PDRB sebesar 8.688 milyar, sedangkan terendah terdapat pada Kawasan Banglor dengan rata-rata PDRB sebesar 5.517 milyar. Rata-rata PDRB kawasan Purwomanggung termasuk rendah dibandingkan kawasan lainnya. Berikut disajikan tabel PDRB Jawa Tengah yang terbagi atas delapan kawasan strategis dari tahun 2009-2015.

Tabel 1. PDRB Menurut Pembagian Kawasan Strategis Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2015 (Jutaan Rupiah)

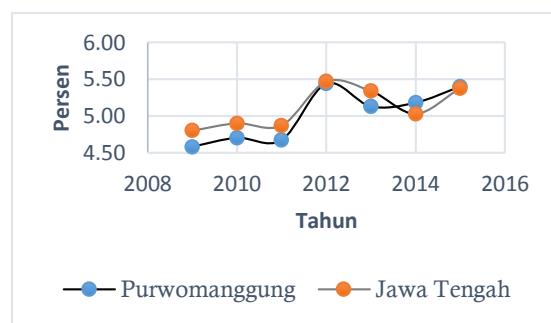
Kawasan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Kedungsepur	37.439	39.507	41.820	44.350	46.914	48.570	49.770	44.053
Wanarakuti	20.587	21.501	22.516	23.623	24.843	26.780	28.990	24.120
Subosukawonosraten	29.403	30.767	32.185	34.047	30.178	35.505	36.778	32.695
Bergasmalang	13.226	13.871	14.545	15.305	16.121	18.980	20.099	16.021
Petanglong	7.027	7.679	8.071	8.500	8.966	9.875	10.700	8.688
Barlingmascakep	24.675	26.012	27.475	29.022	30.667	32.870	33.778	29.214
Purwomanggung	11.977	12.539	13.125	13.839	17.430	19.546	21.664	15.731
Banglor	4.197	4.399	4.554	4.799	5.098	6.809	8.765	5.517

Sumber : BPS Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2009-2015alam Angka 2013

Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pembagian Kawasan Strategis Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2015

Kawasan	2009	2015
Kedungsepur	5,09	5,51
Wanarakuti	4,32	4,51
Subosukawonosraten	5,17	5,52
Bergasmalang	5,02	5,58
Petanglong	4,25	5,12
Barlingmascakeb	5,19	5,77
Purwomanggung	4,58	5,40
Banglor	4,75	5,66
Jawa Tengah	4,80	5,38

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada kawasan Kedungsepur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,51 persen. Rata-rata laju pertumbuhan paling rendah terdapat pada kawasan Banglor dengan pertumbuhan sebesar 4,77 persen. Kemudian setelah Kedungsepur tingkat pertumbuhan pada peringkat ke-dua mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,45 persen yang diperoleh pada kawasan Barlingmascakeb. Pertumbuhan kawasan Purwomanggung berada pada peringkat ke 6 setelah kawasan Subosukawonosraten, Bergasmalang dan Petanglong. Akan tetapi pertumbuhan di kawasan Purwomanggung mengalami kenaikan pada tahun ke tahun dan rata-rata pertumbuhan ekonomi kawasan Purwomanggung mendekati rata-rata pertumbuhan Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. Konsep pendapatan per kapita digunakan oleh Kuznet untuk menganalisis kesenjangan pendapatan.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Dan Kawasan Purwomanggung
Sumber : BPS Jawa Tengah 2009- 2015

Kuznets mengemukakan bahwa tahap pertumbuhan awal distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan semakin membaik. Konsep Kuznets ini dikenal sebagai Hipotesis Kuznets yang searing disebut "Unggulan". Kurva tersebut menunjukkan rangkaian perubahan waktu atas distribusi pendapatan yang dihitung berdasarkan koefisien gini sejalan dengan pertumbuhan PDRB per kapita (Todaro, 2000:65). Disparitas pendapatan antar daerah di kawasan Purwomanggung ditunjukkan dengan perbedaan pendapatan per kapita disetiap kabupaten/kota di kawasan tersebut. Berikut ini merupakan tabel PDRB per kapita atas dasar harga konstan di kawasan Purwomanggung tahun 2009-2012. Tabel 3 menggambarkan rata-rata pendapatan per kapita kota Magelang diatas rata-rata kawasan Purwomanggung yaitu sebesar 9.632.906.

Tabel 3. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Atas Dasar Harga Konstan 2000

No	Kabupaten	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Kab. Purworejo	4.119.000	4.337.759	4.339.305	4.775.605	4.392.917
2	Kab. Wonosobo	2.300.951	2.471.725	2.570.886	2.690.479	2.508.510
3	Kab. Magelang	3.351.395	3.481.023	3.607.405	3.725.600	3.541.356
4	Kab.Temanggung	2.309.841	3.357.870	3.481.837	3.624.491	3.193.510
5	Kota Magelang	8.827.831	9.377.621	9.859.052	10.467.119	9.632.906
	Purwomanggung	4.181.804	4.605.200	4.771.697	5.056.659	4.653.840

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam angka 2009-2015

Sedangkan empat kawasan lain di bawah rata-rata Kawasan Purwo-manggung yaitu Kab.Purworejo, Kab.Wonosobo,Kab.Magelang, Kab. Temanggung. Hal ini membuktikan bahwa belum meratanya pembagian hasil pemabangunan ekonomi di Kawasan yang terbentuk berdasarkan RTRW yang tecantum dalam Perda Prov Jateng No. 6 tahun 2010. Masih terdapat ada nya disparitas pendapatan yang terjadi antar kawasan dapat dilihat melalui peningkatan indeks gini dari tahun ketahun. Hal ini yang patut diperhatikan, dengan adanya peraturan tersebut seharusnya pembangunan dapat terus berkembang disetiap kawasan kerjasama, agar pemerataan antar masyarakat dapat terdistribusi secara merata.

Kegiatan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan mengurangi kemiskinan tidak secara otomatis mengarah pada pengurangan dalam dispartiats. Pada negara berkembang, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan disparitas merupakan hal yang rumit dan kontroversial (Doojav, 2017). Disparitas mengacu pada perbedaan ukuran, derajat, keadaan dan lain-lain. Efek dari Ketidaksetaraan bisa dilihat dengan melebarnya kesenjangan antara kaya dan orang miskin (Islam, 2017). Disparitas pendapatan adalah perbedaan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Todaro,2003:178). Dapat disimpulkan bahwa disparitas pendapatan yaitu perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan

pendapatan yang lebih antar golongan dalam suatu masyarakat.

Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingakt disparitas pendapatan secara menyeluruh. Rumus Gini adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n \frac{Pi(Qi + Qi - 1)}{10000}$$

G = Indeks Gini

Pi = persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Qi = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

Qi-1 = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i-1

k = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai indeks gini adalah diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukan disparitas yang semakin tinggi. Jika nilai Indeks Gini adalah 0 maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketidak merataan pendapatan yang sempurna.

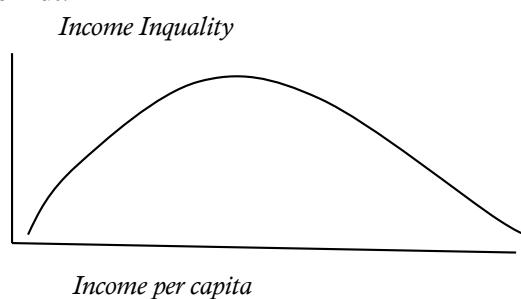
Disparitas Pendapatan Regional

Secara regional atau antar wilayah,berlangsung pula ketidak-merataan distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat.

Dalam perspektif antar wilayah, ketidakmerataan tingkat pendapatan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan di kalangan penduduk masing-masing wilayah.

Dalam perbandingan antara Pulau Jawa, secara umum distribusi pendapatan di kalangan lapisan-lapisan masyarakat di luar Jawa lebih baik daripada di Jawa. Namun demikian, distribusi itu sendiri semakin membaik di kedua wilayah. Terdapat kecenderungan yang sama di kedua wilayah. Dalam hal tingkat pendapatannya sendiri, terdapat perbedaan yang cukup mencolok diantara wilayah-wilayah ditanah air. Pembandingan dapat dilakukan melalui angka-angka Produk Domestik Bruto per kapita antar Provinsi (Dumairy : 1997:56)

Banyak cara telah diberikan agar distribusi pendapatan dapat berubah dalam masa pembangunan. Simon Kuznets (1995) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*interval U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata. Observasi inilah yang dikenal dengan hipotesis U-terbalik sesuai dengan bentuk rangkaian perubahan kecenderungan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini-pertumbuhan GNP perkapita seperti yang digambarkan pada kurva berikut:



Sumber Kuznet, 1955

Gambar 2. Kurva U-Terbalik Kuznet

Kuznets (1955) mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi

peningkatan disparitas dan akhirnya menurun lagi. Ini dijelaskan dalam kurva U terbalik yang menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan disparitas pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif.

Kuznets (1955) mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa di temui hampir semua negara yang sekarang maju adalah (1) Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan pen-duduk yang tinggi. (2) Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi. (3) Tingkat transformasi struktural dengan ekonomi yang tinggi. (4) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. (5) Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Disparitas Pendapatan, masalah di Negara yang sedang berkembang salah satunya adalah menurunnya kualitas kehidupan daripada rendahnya pendapatan. Pembangunan merupakan proses yang memperluas *entitlement* dan *kapabilitas* manusia untuk hidup sesuai dengan yang diinginkannya (Kuncoro 1997 :21). Entilement adalah sejumlah komoditas yang dapat diperoleh seseorang dalam masyarakat dengan menggunakan seluruh peluang dan hak yang dia miliki. Kapabilitas diartikan mencakup apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan , misalnya dari kelaparan dan kekurangan gizi, partisipasi dalam masyarakat, bebas berpergian menengok teman, memperoleh tempat tinggal yang memadai.

Indeks Pembangunan Manusia yang tidak merata antar daerah akan menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah berbeda mengakibatkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat kualitas manusianya yang rendah. Hal ini akan mendorong tidak seimbangnya pembangunan yang terjadi antar daerah satu dengan yang lainnya. Apabila hal ini terus dibiarkan maka disparitas pendapatan yang terjadi antar daerah akan semakin meningkat.

Hubungan Investasi dengan Disparitas Pendapatan, Harrod-Domar melalui teori-nya menerangkan adanya hubungan po-sitif antara tingkat investasi dan laju perekonomian, dapat dikatakan ku-rang nya investasi dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi dan rendah nya pertumbuhan perkapita (Todaro 2006:128). Hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif, dengan putusnya investasi suatu wilayah akan mengalami disparitas karena sumber daya alam kurang bisa dioptimalkan tanpa adanya investasi yang tidak diterima oleh setiap wilayah yang ada.

Harrod - Domar mengartikan pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya ia mengatakan bahwa investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga disertai dengan disparitas pendapatan antar lapisan masyarakat, dikarena-kan tidak setiap daerah bisa menerima dana investasi tersebut. Setiap investor akan memberikan kriteria daerah yang menurut para investor memiliki sumber daya alam dan manusia yang memadai agar dapat menguntungkan para investor tersebut. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Disparitas Pendapatan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 salah satu tujuan dari desentralisasi yaitu memperkecil disparitas pendapatan antar daerah dengan mekanisme transfer dan memperbesar kewenangan daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki.

Diberlakukan nya desentralisasi setiap daerah berhak mengurus semua kepentingan daerahnya ter-masuk dalam penetapan pengeluaran pemerintah daerah yang ada dalam APBN. Sesuai peran pemerintah dalam perekonomian, pemerintah memiliki peran stabilisasi, peran alokasi, peran distribusi, dan pran dinamisasi. Begitupun pengeluaran daerah harus berlandaskan pada peran-peran tersebut.

Disparitas pendapatan dapat diminimalisir dengan pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di daerah yang bersekalai kecil, dan kebijakan fiskal wilayah yang mendukung penyelesaian masalah disparitas pendapatan. Dalam upaya penyelesaian masalah disparitas ter-sebut dibutuhkan pengeluaran pe-merintah yang terkoordinir sehingga memacu pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian menggunakan data-data yang berupa angka yang kemudian diolah dengan menggunakan alat analisis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah E-views. Setelah data diolah dengan E-views output yang dihasilkan kemudian dijelaskan menggunakan analisis deskripsi dan disesuaikan dengan teori yang mendukung sudah sesuai dengan teori atau berlawanan dengan teori yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu gabungan data runtut waktu (*time series*) yang merupakan data tahunan, dimulai dari tahun 2009 sampai tahun 2015, dan data silang tempat (*cross section*) yang terdiri dari 5 Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung yang merupakan kawasan strategis di Jawa Tengah. Pengujian Model, dalam menggunakan data panel, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Pendekatan common effect adalah estimasi yang dilakukan hanya dengan menggabungkan data time series dan data cross section. Persamaan yang diperoleh adalah satu persamaan untuk semua wilayah, sehingga intersep dan slop untuk setiap provinsi sama.

Salah satu cara untuk me-ntahui perbedaan intersep adalah dengan mengasumsikan bahwa intersep berbeda antar objek sedangkan koefisien regresinya tetap sama antar objek. Model ini dikenal dengan mode *fixed effect* (efek tetap). Efek tetap yang dimaksud adalah adanya perbedaan intersep antar objek namun intersepnya sama antar waktu (*time invariant*). Model *fixed effect* ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*)

tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2009:233).

Pendekatan *random effect model* menghasilkan intersep yang berbeda-beda untuk setiap wilayah namun diasumsikan random. Hal tersebut dikarenakan adanya variabel gangguan yang saling mempengaruhi antar wilayah maupun antar periode waktu. Untuk memilih model yang tepat dari ketiga analisis tersebut, maka perlu dilakukan beberapa pengujian, dengan melakukan uji Chow dan Uji Husman yang ditunjukkan untuk menentukan model apakah yang dipilih antara common effect, fixed effect atau kah random effect yang baik digunakan.

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang baik di-gunakan apakah dengan metode Common effect atau dengan fixed effect, apabila dari hasil uji Chow tersebut ditentukan bahwa metode common effect yang digunakan, maka tidak perlu diuji kembali dengan Uji Husman, namun apabila dari hasil Uji Chow tersebut ditentukan bahwa metode Fixed Effect yang digunakan maka harus ada uji lanjutan dengan Uji Husman untuk memilih antara metode Fixed Effect atau metode Random Effect yang aka digunakan untuk mengestimasi regresi data panel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas Pendapatan, dalam pemahaman ekonomi makro pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional secara terus menerus (Tambunan, 2011: 40). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi yang baik bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk setiap tahun akan mengalami peningkatan terus-menerus, sehingga tingkat konsumsi sehari-hari akan bertambah juga setiap tahunnya. Pertumbuhan per-ekonomian yang tinggi tanpa disertai dengan per-tumbuhan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut yang selanjutnya akan menciptakan pertumbuhan eko-nomi dengan peningkatan kemiskinan.

Hasil regresi ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Kuznets bahwa dalam jangka pendek per-tumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap disparitas pendapatan.

Observasi inilah yang dikenal dengan hipotesis U-terbalik sesuai dengan bentuk rangkaian perubahan kecenderungan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini-per-tumbuhan GNP perkapita. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Yosi Eka Putri dalam penelitiannya me-ngatakan bahwa pertumbuhan eko-nomi secara signifikan mempengaruhi disparitas pendapatan di Indonesia pada tahun 2008-2012. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi di daerah lain akan menyebabkan ketimpangan pem-bangunan.

Pengaruh IPM Terhadap Disparitas Pendapatan, IPM adalah ukuran capaian pembangunan manusia yang berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia sendiri tersusun atas tiga aspek mendasar pem-bangunan manusia. Aspek kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator angka melek huruf an rata-rata lama sekolah, serta dimensi perekonomian yang bermakna kehidupan layak digambar-kan dengan kemampuan daya beli. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk menggambarkan pem-bangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih digunakan oleh negara-negara di dunia untuk mengukur tingkat pembangunan manusia. IPM di Kawasan Puro-manggung berada di level menengah atas dengan kisaran IPM 65,20-77,91.

Indeks Pembangunan Manusia yang tidak merata antar daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kualitas manusia yang lebih baik dan ada daerah yang relatif kurang maju akibat kualitas manusia nya yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk

ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pen-didikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya per-tumbuhan ekonomi baik secara lang-sung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan. Hal ini akan mendorong tidak seimbangnya pem-bangunan yang terjadi. Apabila di-biarkan maka disparitas pendapatan antar daerah semakin melebar. Ini se-jalan dengan penelitian yang dilaku-kan oleh Yosi (2012) yang mengatakan bahwa Indeks Pem-bangunan Manusia berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di-Indonesia.

Pengaruh Investasi Terhadap Dis-paritas Pendapatan, investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investor dalam menentukan pilihan untuk mengelu-kan dana yang diharapkan akan menguntungkan tentunya melihat kriteria dan potensi suatu wilayah yang memiliki nilai tambah untuk para investor. Hal ini yang sering me-ngakibatkan investasi tidak me-nyeluruh ke semua wilayah. Investasi sendiri dapat diguna-kan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, investasi tersebut dapat digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi yang berguna untuk menunjang per-ekonomian dalam suatu wilayah. Nilai investasi harus di Log Natural terlebih dahulu, karna nilainya terlalu besar dibandingkan dengan nilai disparitas pendapatan, per-tumbuhan ekonomi dan Indeks Pem-bangunan Manusia.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (2013) menemukan bahwa investasi yang terus meningkat maka disparitas pendapatan akan meningkat. Di daerah yang sedang mengalami per-kembangan kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan per-mintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi. Di daerah lainnya dimana perkembangan sangat lamban maka permintaan terhadap modal untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung semakin rendah. Dengan perbedaan per-kembangan perbedaan tersebut dan terkonsentrasi

investasi didaerah yang mapan mengakibatkan terjadinya disparitas pendapatan.

Hasil regresi ini sesuai dengan teori Harrod-Domar yang menjelaskan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang me-nentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam per-spektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat kita simpulkan, investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, seiring dengan pe-ningkatan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada disparitas pendapatan. Peningkatan atau pe-nurunan investasi yang saling ber-hubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu disparitas pendapatan antar daerah. Karena semakin banyak investasi yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa di mana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Disparitas, Pengeluaran pemerintah ada-lah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembayaran yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintah dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Se-cara lebih rinci pengeluaran pe-merintah digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata dan mem-biayai berbagai jenis infrastruktur dalam proses pembangunan.

Pengeluaran pemerintah sangat penting secara keseluruhan dalam kontribusinya terhadap pem-bangunan nasional. Proporsi dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari pembangunan nasional. Secara nor-matif belanja pembangunan atau belanja publik diusahakan lebih besar proporsinya dibandingkan dengan belanja aparatur atau belanja rutin. Karena dengan lebih besarnya belanja publik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai pengeluaran pemerintah harus di Log natural kan terlebih dahulu karna nilainya terlalu besar dibandingkan dengan nilai disparitas pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja-belanjadaerah yan dilakukanoleh pemerintah belum mampu mempengaruhi terjadinya ke-senjangan pendapatan, dimana belum meratanya pembangunan dan tidak terserapnya tenaga kerja yang dapat menambah pendapatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariza (2014).

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh beberapa kesimpulan bahwa Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi yang baik bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk setiap tahun akan mengalami peningkatan terus-menerus, sehingga tingkat konsumsi sehari-hari akan bertambah juga setiap tahunnya. Pertumbuhan perekonomian yang tinggi tanpa disertai dengan pertumbuhan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut yang selanjutnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Bagi pembuat kebijakan sekarang harus memasukkan gagasan tentang kemiskinan sebagai sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan dalam wacana pembangunan nasional (Hanandita, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Barro, J. Robert. 2000. "Inequality and Growth in a Panel of Countries". Dalam *Jurnal of Economic Growth*, 5:5-32. Kluwer Academic Publisher in the Nether-lands
- BPS Jawa Tengah Dalam Angka 2003-2013 Semarang : Badan Pusat Statistik.
- _____ Pendapatan Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2003-2013. Semarang : Badan Pusat statistik
- _____ Pendapatan PDRB per-kapita Kabupaten/Ko-ta Jawa Tengah 2009-2013 Semarang : Badan Pusat Statistik
- Doojav, G. O., Bayarjargal, A.E. 2017. Implications of Economic Growth, Poverty and Inequality in Mongolia over the Period of 2008-2012. *The Northeast Asian Economic Review*, 5(2).
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Islam, R., Bashawir, A, G., Abidin, I. Z., Rayaiappan, J. M. 2017. Impact on poverty and income inequality in Malaysia's economic growth. *Problems and Perspectives in Management*, 15(1).
- Kuznets, Simon. 1955. "Economic Growth And Income Inquality". *The American Economic Review*, Volume XLV, 1995No. 1
- Disparitas Pendapatan antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah". *Skripsi*.
- Hanandita, W., Tampubolon, G. 2016. Multidimensional Poverty in Indonesia: Trend Over the Last Decade (2003–2013). *Social Indicators Research* 128(2), 559–587.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah Dan Kebijakan*, cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademik manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta
- Nuriansyah, Fazar. 2011. "Pengaruh PDRB Perkapita, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan antar Daerah di Jawa Barat". Dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Koperasi*, Vol. 6, No.152-167
- Puntri, Gagarina, Ado. 2016. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Inves-tasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa timur 2011-2013."
- Rehman Ur,Hafeez.2008."Income Distribution, Growth, And Financial Development". Dalam *Pa-kistan Economic and Social Review* Volu-me46, No. 1
- Udayana Savitri, Ayu Gama. 2006. "Disparitas dan Konvergensi PDRB per kapita antar Kabupaten/Kota Di Bali". *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, INPUT Volume 2 nomor I. Provinsi Bali, Universitas.
- Todaro,Michael.2003. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta : Elangga.
- Tambunan, T.H. Tulus. 2011. *Perekonomian Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia
- UU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang RTRWhttp://www.pu.go.id/uploads/service s/infopublik.